

EVALUASI PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA LEBONG TAMBANG

Adi Suardi

adisuardi2@gmail.com

Ifnaldi

ifnaldi1965@gmail.com

Murniyanto

yantomurni.65@gmail.com

Hamengkubuwono

hamengkubuwono@iaincurup.ac.id

Institut agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Abstract

This study aimed to find an overview as regards the evaluation concerning the use of school operational assistance funds (BOS) at MIS 01 Lebong Tambang by using a qualitative approach. The data were obtained using observation and interview techniques. After collected, the data were analyzed using the Miles, Huberman and Saldana's approach extending to data selection, data presentation, and conclusion drawing. This study concluded that the evaluation of distribution and use of school operational assistance funds (BOS) conducted by the school became a very helpful medium for the school per se. Such evaluation was oriented towards increasing the resources of teaching staffs. Based on evaluation, it was found a mismatch between the budget ceiling of BOS and the teachers' needs. School facilities and infrastructure such as the construction of new classrooms, let alone Worship facilities such as Musalla, could not use school operational assistance funds (BOS), so it was very difficult for the school because for RKB the budget had to be separated from the school operational assistance funds (BOS).

Keywords: Evaluation, BOS funds, Private School

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran evaluasi penggunaan dana bantuan operasional Sekolah di MIS 01 Lebong Tambang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik obserbasi dan wawancara. Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan pendekatan Miles, Huberman dan Saldana yaitu, pemilihan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memperoleh simpulan bahwa Evaluasi penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lakukan oleh pihak sekolah merupakan media yang sangat membantu pihak sekolah itu sendiri. Evaluasi tersebut terfokus pada meningkatkan sumber daya tenaga pendidi, ditemukan ketidak sesuaian pagu anggaran (BOS) dengan kebutuhan guru, saran dan prasarana sekolah seperti pembangunan Ruang Kelas Belajar Siswa (RKB) baru apalagi sarana Ibadah seperti Musalla tidak bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga sangat menyulitkan bagi pihak sekolah dikarenakan untuk pembangunan RKB harus terpisah anggarannya dari dana Bantuan Operasional sekolah (BOS).

Kata Kunci: Evaluasi, dana BOS, Sekolah Swasta

Pendahuluan

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan Sumber Daya Manusia, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi (Hamirul & Apriana, 2019; Januwarso, 2017). Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia dalam “Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal” (Murtiningsih, 2017). Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan “Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia” (Hakim, 2016; Hidayat, 2017; Maghfuri, 2020).

Visi Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah (Hakim, 2016). Adapun langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut antara lain: “Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; Meningkatkan mutu pendidikan yang

mempunyai daya saing tingkat nasional, regional maupun internasional; Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan; Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Hikmah, 2018).

Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan langkah-langkah reformasi atau menyempurnakan sistem pendidikan yang meliputi: “*Pertama* Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik sehingga terjadi pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran, Paradigma pengajaran yang menitikberatkan peran pendidik dalam menstransformasi pengetahuan bergeser ke paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya; *Kedua* Perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara

utuh”(Dewi & Rati, 2017; Sudarsana, 2016).

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana-prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah (Rohim, 2015; Sucika & Suprpta, 2018). Selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era industri 4.0 ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing (Rohimin, 2020). Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global (Maryadi, 2014; Rohim, 2015; Sucika & Suprpta, 2018).

Namun diketahui bahwa gambaran umum mutu Sumber Daya Manusia Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh UNDP setiap tahun menunjukkan tingkat pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia ternyata masih memprihatinkan (Rohim, 2015). Demikian juga peringkat Indeks Pertumbuhan Daya saing Indonesia masih sangat rendah belum sesuai yang diharapkan (Salam, 2016). Kondisi ini adalah sebuah realitas yang menjadi isyarat bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bekerja keras secara terus menerus dan konsisten meningkatkan mutu pendidikan manusia dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu wahana dalam pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, unggul dan berdaya saing.

Jika ditarik kebelakang, kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui Peningkatan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini dirasakan kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar (Sulistian et al., 2017). Kebijakan ini dilakukan dikarenakan bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tahun-tahun tersebut yang diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya, sehingga kondisi semacam itu akan dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun juga berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan (Setyaningrum, 2014).

Salah satu program pemerintah dibidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah Program Pemerintah yang pada dasarnya adalah unyuk penyediaan pendanaan biaya Operasional Non Personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana Program Wajib Belajar (Nasution et al., 2020; Rahayu & Setianingsih, 2017; Regina, 2015). Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur transportasi, konsumsi dan lain sebagainya yang diatur dalam Juknis penggunaan oleh masing-masing kementerian (Kasmini et al., 2017; Sihombing, 2017).

Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.

Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran. Bahkan dana BOS merupakan pembiayaan pendidikan yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan perlatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan. Adapun besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk pada tahun anggaran 2019 dengan ketentuan (Hamirul & Apriana, 2019; Setiawati, 2019):

Tabel. I Biaya Satuan BOS T.A 2019

No	Tingkat Sekolah	Biaya satuan
1	Madrasah Ibtidaiyah	800.000,-
2	Madrasah Tsanawiyah	1.000.000,-
3	Madrasah Aliyah	1.400.000,-

Demikian halnya, Program BOS di Kabupaten Lebong secara konsep menjelaskan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan

untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik, sebagaimana yang termuat dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, tetapi dengan melihat fenomena yang terjadi khususnya pada madrasah dikabupaten Lebong tentang program BOS ternyata belum sesuai seperti yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan belum efektif dan efisiennya penyaluran dana, pemanfaatan serta pertanggungjawaban sekolah.

Hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar, karena apabila Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tidak tercapainya pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagai salah satu Renstra Departemen Pendidikan Nasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka suatu organisasi atau sekolah harus mempunyai peranan yang tinggi dalam pemanfaatan dana BOS (Hamirul & Apriana, 2019).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan organisasi yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi sangat ditentukan oleh faktor internal antara lain sumber daya manusia, biaya operasional, sarana dan prasarana, sistem dan prosedur serta teknologi. Sedangkan faktor eksternal antara lain koordinasi dengan organisasi lain, dukungan masyarakat dan faktor lingkungan lainnya (Amin, 2017; Krisbiyanto, 2019; Laugi, 2019). Kedua faktor ini saling terkait dan mendukung.

Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mempunyai orientasi dan proyeksi dalam mengimplementasikan seluruh program kerja yang telah.

Upaya mengukur keberhasilan capaian tujuan yang telah dirumuskan dalam suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep evaluasi. Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar obyektif yang telah ditetapkan kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi. Konsep evaluasi menekankan pada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Sasaran evaluasi adalah mengetahui keberhasilan suatu program (Lazwardi, 2017). Sebagaimana *Bruce W Tuckman* mengartikan “evaluasi sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan”(Warsino, 2019). Evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu program dimulai dari implementasi sampai keluaran (*output*), dan dampak (*impact*) dari program tersebut telah sesuai dengan tujuan program bersangkutan (Ismail, 2018).

Dalam pemanfaatan bantuan dana BOS, kemampuan administratif atau manajer sangat penting dalam mengatur instrumental *input* (komponen didalam pendidikan) agar proses dapat berjalan sesuai tujuan dan membutuhkan pemanfaatan dana BOS yang efektif dan efisien, seperti menggunakan sarana prasarana, kurikulum dan administrasi dalam suatu lembaga pendidikan (Kasno et al., 2013). Di samping dukungan dan perumusan yang jelas dari pemerintah, juga peranan penting kepala sekolah sebagai

pemegang wewenang tertinggi dibantu oleh para pegawai dan guru harus mampu bersinergi melaksanakan tugas agar apa yang menjadi tujuan BOS dapat tercapai. Sebab ketercapaian tersebut tidak akan terwujud jika perangkat akademik di sekolah tidak memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan program tersebut.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan yang dioperasional dan diberikan pemerintah dengan harapan Sekolah dapat meningkatkan efektivitas layanan pendidikan terhadap masyarakat (Sucika & Suprpta, 2018). Bukan saja pada sekolah Negeri, tetapi juga terhadap sekolah swasta pun pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Hamirul & Apriana, 2019). Terkait dengan Sekolah Swasta/Madrasah Swasta adalah lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat atau suatu organisasi yang memiliki badan Hukum tetap yang dikeluarkan status hukumnya oleh Kemenkumham seperti Madrasah Ibtidaiyah yang berada di wilayah Kabupaten Lebong.

Realitas di lapangan berdasarkan hasil observasi pra penelitian masih ditemukan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum mampu memaksimalkannya dalam upaya peningkatan layanan pendidikan dasar 9 Tahun sebagaimana Program pemerintah dalam Upaya Pendidikan Dasar 9 Tahun, hal ini disebabkan adanya Kekurangan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2 tahun terakhir ini sejak 2018-2019. Persoalan ini mendorong peneliti untuk melakukan studi lebih mendalam tentang pemanfaatan dana BOS khusus pada Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Lebong khususnya di MIS 01 Lebong Tambang.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebong yang menjadi objek penelitian adalah MIS 01 Lebong Tambang yang merupakan salah satu sekolah yang diberi kewenangan untuk melakukan/melaksanakan Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang dilaksanakan pada Bulan Februari 2020 sampai dengan Mei 2020, dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Gironés Guillem et al., 2018). Pemilihan pendekatan tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami gambaran evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong terutama kepada MIM 01 Lebong Tambang.

Guna menemukan jawaban tentang fokus masalah tersebut, penelitian ini mengumpulkan data di lapangan dengan menggunakan teknik observasi secara mendalam dan menggali informasi dari pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah dan bendahara serta wali murid MIS 01 Lebong Tambang berkaitan dengan gambaran pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (Miles et al., 2014; Roulston, 2014; Saldaña, 2015). Setelah data terkumpul, selanjutnya dipilih atau direduksi kemudian data tersebut disajikan dalam paparan data hasil penelitian sesuai dengan bukti dan data yang telah diperoleh di lapangan dan dianalisis dalam pembahasan. Pada tahap akhir akan disajikan

kesimpulan sebagai jawaban dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada pendahuluan, sehingga akan tergambar hasil evaluasi yang terjadi dalam pemanfaatan pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan kepala MIS 01 Lebong Tambang (Saldaña, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Salah satu Program pemerintah yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat miskin adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui program BOS Pemerintah memberikan dana ke-sekolah-sekolah antara lain SD/MI, SMP/MTs SMA/MA/SMK baik Negeri maupun swasta yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam program BOS (Sihombing, 2017). Secara konseptual Program BOS berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan diberikan dalam bentuk bea siswa sedangkan bagi siswa miskin yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM) (Rohim, 2015).

Adapun tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Hamirul & Apriana, 2019). Berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut di atas, pada bagian ini dipaparkan data hasil penelitian dari jawaban informan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini akan dideskripsikan tentang evaluasi pemanfaatan dana bantuan operasional

sekolah (BOS) yang dilakukan oleh pihak MIS 01 Lebong Tambang.

Sebagaimana sesuai dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui mengapa pemanfaatan dana program BOS di MIS 1 Lebong Tambang, maka peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang terkait seperti kepala sekolah, bendahara sekolah, serta orang tua siswa, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) berjalan efektif. Beberapa keterangan yang didapatkan dari wawancara dengan informan setidaknya dapat menggambarkan bagaimana pemanfaatan dana BOS dan apa saja yang dievaluasi dalam pengelolaan kaitannya terhadap pembelajaran di MIS 1 Lebong Tambang. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teori evaluasi yang dikembangkan oleh Bruce W Truckman (Warsino, 2019). Adapun pemanfaatan MIS 1 Lebong Tambang sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Pertama, dari segi pencapaian masukan berkaitan dengan sumber daya manusia, walaupun tidak ada persyaratan khusus berkaitan dengan petugas yang menangani program BOS, tetapi dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) beberapa faktor kualifikasi seperti latar belakang pendidikan, pengalaman dan kompetensi perlu diperhatikan. Petikan wawancara dengan Ibu Herniwati, S.Pd Kepala MIS 1 Lebong Tambang mengungkapkan hal tersebut: “Saya cukup lama menjadi kepala sekolah disini sudah

18 (tujuh) tahun, dan pertama kalinya dana BOS dikucurkan di sekolah ini sejak tahun 2005, saya merasakan manfaat dana BOS ini sangat bagus terhadap siswa dan memberikan perubahan signifikan sebagai penunjang terselenggaranya dana BOS”. (wawancara, 12 Februari 2020). Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa: “sejauh ini bendahara sekolah yang mengelola dana BOS cukup kompeten dalam dengan bidangnya dan sudah berpengalaman dalam mengelola biaya pendidikan di sekolah selama 7 tahun”. (wawancara, 12 Februari 2020).

Keterangan di atas juga diperkuat oleh keterangan yang didapat dari orang tua siswa MIS 1 Lebong Tambang yang terlibat sebagai anggota komite sekolah menyatakan bahwa: “Pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di MIS tersebut selama ini berjalan dengan lancar, salah satu faktornya adalah sumberdaya pengelola dan yang saya ketahui bendahara sekolah adalah orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan manajemen dana BOS di sekolah ini, dan beliau berpengalaman sebagai bendahara sekolah apalagi beliau sebagai guru agama.” (Wawancara, 20 Maret 2020).

Selain itu, mengenai kompetensi guru, setiap sekolah melakukan pengembangan bagi setiap guru mata pelajaran dan membina guru sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan dana BOS dalam pengembangan kompetensi guru dilakukan sekolah dengan berbagai macam cara, seperti yang disampaikan oleh Ibu herniwati, S.Pd.I, Kepala MIS 1 Lebong Tambang bahwa “untuk pengembangan kompetensi guru, kami pihak sekolah sedapat mungkin memanfaatkan dana BOS, misalnya mengikutsertakan guru-guru pada diklat, workshop, KKG, serta

memfasilitasi (transportasi) kebutuhan guru dalam setiap aktivitas pengembangan kompetensi mereka.” (wawancara, 15 April 2020 melalui whatsapp).

Masalah dana BOS patut diamati, apakah dalam penyalurannya telah tepat waktu, prosedur penyaluran, sampai persyaratannya. Kepala MIS Lebong Tambang, Ibu Herniwati, s.Pd.I sebagai penanggung jawab memaparkan pendapatnya sebagai berikut :

“Masalah penyaluran dana pada tahun 2019 masih mengalami keterlambatan, tahun lalu bulan April untuk semester 1 TA 2019 dan Bulan Agustus untuk Tahap 2 dan dikarenakan ada kekurangan BOS TA 2019, maka sekolah kami memperoleh penambahan dan baru cair di bulan Desember 2019, bahkan pada tahun 2020 masih terjadi keterlambatan, dikarenakan masih terdapat kendala Masalah Izin Operasional Madrasah sudah Habis sehingga kami menunggu terbitnya izin operasinal dan mudah-mudahan di bulan juni ini bisa cair, juga terdapat kendala adanya pemamngkasan terhadap dampak COVID-19 ini, baik dari daftar usul alokasi anggaran dan sebagainya kami sudah merampungkannya untuk di serahkan ke Kantor Kemenag Kab. Lebong untuk mendapatkan dana” (15 April 2020)

Berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana BOS ke Madrasah dijelaskan oleh Bendahara sekolah Sumardi, S,Pd.I secara virtual sebagai berikut:

“berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana BOS masuk melalui rekening sekolah per Semester, di mana sistem dan prosedurnya, terlebih dahulu kami harus membuat surat perjanjian

dan surat pernyataan, kemudian membuat rencana kegiatan anggaran Madrasah (RKAM), membuat daftar usul alokasi anggaran bantuan operasional sekolah (BOS), dan setelah dana cair/keluar maka pihak sekolah wajib membuat laporan pertanggungjawaban BOS per Semester ke Kantor Kemenag kabupaten Lebong” (Wawancara, 1 Mei 2020)

Mekanisme penyaluran dana BOS seperti yang paparkan oleh bendarah di atas memang menimbulkan asumsi bahwa masalah penyaluran yang mengalami keterlambatan penerimaan dana di rekening sekolah tadi merupakan penyebab utama pemanfaatan dana menjadi kurang efektif. Sebab jika ditinjau dari segi transparansi, terlihat bahwa adanya transparansi dana di MIS Lebong Tambang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan pemanfaatan dana bos per Semester secara rinci, akan tetapi khusus pada papan informasi penggunaan dana BOS, data pengelolaan dananya jarang diperbaharui, sehingga beberapa wali murid yang ingin melihat perkembangan penggunaan dana bos tidak mendapatkan informasi yang diinginkan.

2. Sarana Prasarana

Membahas tentang permasalahan sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya cukup kompleks, namun demikian dapat ditelusuri dari berbagai sisi, yaitu dari segi jenis, proses, dan pemanfaatannya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program telah memadai, seperti yang dituturkan Kepala MIS 1 Lebong Tambang melalui virtual bahwa: “terkait dengan kelengkapan sarpras, program kami

di sini sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti komputer, LCD, ruang guru, yang dapat digunakan. Selain itu permasalahan yang kami hadapi masih kurangnya guru dan ruang belajar serta Tempat Ibadah Musallah” (Wawancara, 27 Mei 2020).

Pendapatan di atas juga diperkuat oleh informasi Bapak Sumardi, selaku bendahara memaparkan bahwa:

“Masalah sarana dan prasarana dalam pembelajaran siswa sudah cukup memadai dan hal tersebut juga memanfaatkan dana BOS. Namun masih banyak fasilitas yang kurang, terlebih lagi masalah infrastruktur bangunan yang digunakan siswa masih dalam tahap pengajuan ke Kemenag Kab. Lebong agar dapat menambah Ruang Belajar siswa. Kami terus mengusahakan untuk melengkapinya, dan masalah masih dikenakan atau tidaknya pembiayaan pendidikan, kami pihak sekolah berusaha tidak memungut biaya dari orang tua siswa” (Wawancara, 6 Mei 2020).

Kemudian dari itu Ibu Herniwati menuturkan dengan penuh harap bahwa:

“Kami sangat menginginkan adanya penambahan Ruang Belajar siswa dan berharap adanya bantuan dari pemerintah baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah “kami sangat berharap adanya bantuan pembangunan Ruang Belajar siswa baik dari pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong, dan juga berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam hal ini pembakab Lebong” (Wawancara, 6 Mei 2020).

Keinginan dari pihak sekolah di atas diperlu diperhatikan oleh pemerintah setempat, meskipun sekolah tersebut merupakan sekolah yang didirikan oleh yayasan dan berdiri di desa yang cukup jauh dari pusat kota tetap harus menjadi perhatian terutama menyangkut kepengkapan dan kelayakan sarana dan prasarana, karena unsru tersebut merupakan salah satu penunjang dalam kegiatan pembelajaran agar siswa merasakan kenyamanan dalam menerima pengetahuan dari guru (Warsah, 2020). Sarana dan prasarana dimaksud tentu bukan hanya Ruang belajar siswa namun juga Ruang Praktek Ibadah Keagamaan mengingat kegiatan Ekstra Kulikuler di madrasah diperbanyak dengan praktek Keagamaan, seperti shalat Dhuha dan zuhur berjamaah, tentu sangat membutuhkan tempat ibadah yang layak. Hal ini menjadi prioritas terpenting bagi sekolah seperti pembangunan Musalla, melalui sarana ini pembangunan Sumber Daya Manusia sejak usia sekolah dasar terlaksana dengan baik. Sebab lembaga pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk pendidik anak agar berpengetahuan yang luas namun juga berbudi pekerti yang luhur serta beriman dan bertakwa kepada Allah.

Ketika sarana dan prasarana sebuah sekolah tidak memadai tentu proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana dikelukan oleh salah seorang guru yang menyatakan bahwa: “kami sangat kesulitan dalam melaksanakan praktek inadah seperti sholat, kami setiap jumat melaksanakan sholat dhuha berjamaah dikeranakan belum ada musallah ya kami menggunakan lapangan atau halaman sekolah, dengan cara kami membentang terpal dan anak-

anak kami suruh bawah sajadah sendiri dari rumah masing-masing” (Wawancara, 21 April 2020)

Terkait dengan sarana penunjang yang lain informan sekunder yaitu salah seorang tenaga kependidikan di MIS 01 Lebong Tambang menyatakan bahwa:

“Selain sarana dalam bentuk fasilitas ibadah, ada juga problem yang dihadapi sekolah yang harus disiasati dengan dana BOS adalah jumlah buku paket yang tersedia di sekolah kami, sebab jumlah penggunaan buku belum sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada setiap semester baru (penerimaan siswa baru), karena sulit untuk mengkasifikasinya, tetapi sekolah terus mengupayakan kekurangan tersebut karena banyak anggaran lain yang dikeluarkan oleh sekolah” (wawancara, 8 Mei 2020).

Selain itu, mengenai sarana dan prasarana yang mendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), terlihat pihak sekolah sedapat mungkin memanfaatkan untuk perawatan sarana dan prasarana yang telah ada, pembelian buku, dan sarana prasarana sekolah lainnya. Berikut petikan wawancara dengan salah satu orang tua siswa MIS 1 Lebong Tambang Ibu Yuni Fitria berkaitan dengan pemanfaatan BOS bagi sarana prasarana sekolah: “sebenarnya BOS membantu orang tua, meringankan biaya, tapi masih ada kekurangannya, mengenai soal buku, saya dapat laporan dari anak saya, masih ada yang tidak mendapatkan buku” (Wawancara 21 Mei 2020). Berkenaan dengan hal tersebut pada kesempatan lain peneliti kembali meminta keterangan Ibu herniwati, S.Pd.I Kepala MIS 1 Lebong Tambang melalui virtual, menyampaikan pendapatnya:

“BOS sangat membantu pelaksanaan kegiatan belajar siswa, pengeluaran sekolah yang berasal dari dana BOS untuk guru honorer saja mengambil 30% dari dana BOS, belum lagi dilakukannya perawatan sekolah dsb, apalagi sekolah menyediakan buku untuk siswa. Selebihnya fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar sudah efektif dan memadai, dari peralatan penunjangnya (fasilitas di sekolah ini)” (wawancara, 23 Mei 2020).

Berkaitan dengan pemanfaatan dana BOS senada yang disampaikan oleh Ketua Komite Sekolah Bapak Robert Mengatakan:

“Mengenai dana BOS yang didapatkan oleh MIS 1 Lebong Tambang Pengelolaannya sudah sangat Transparan komite Madrasah selalu dilibatkan mengenai rencana Kerja Kepala Madrasah, terlebih lagi kegiatan belajar siswa, termasuk kebutuhan sarana dan prasarana, tentu kami sebagai ketua komite sekolah memberikan dukungan sepenuhnya dengan rencana tersebut. Memang sarana dan prasarana sekolah ini harus menjadi prioritas apalagi menyangkut sarana ibadah, kami kira dan setuju kalau pihak sekolah membuat usulan kepada pihak pemerintah untuk membantu mewujudkan keinginan tersebut termasuk dengan menggunakan dana BOS” (wawancara, 26 Mei 2020).

Kekurangan fasilitas ruang ibadah menjadi prioritas bagi Madrasah terlebih lagi untuk kegiatan Praktek Ibadah, Koimite sekolah mengadakan rapat wali siswa mengajak selauruh dewan guru mencari solusi dikarenakan kalua mengadakan dana BOS yang diterima tidak memungkinkan untuk membangun musalla. Lebih lanjut ketua komite sekolah mengemukakan bahwa:

“Menindaklanjuti keingan sekolah tersebut, kami telah melakukan rapat dan mengundang seluruh wali murid guna mencari solusi untuk membatu madrasah ini membangun musallah dan ternyata wali siswa sangat mengapresiasi untuk bergotong royong dengan cara memberikan sumbangan yang tidak ditentukan serta masyarakat sekitar pun sangat antusias untuk memberikan sumbangan, ada yang menyumbang bahan seperti batu, pasir dll” (Wawancara, 26 Mei 2020).

Ibu Herniwati, S.Pd.I menanggapi hal tentang pembangunan Musalla terkait dengan dukungan pihak komite sekolah

“Saya atas nama seluruh jajaran pengelola MIS 01 Lebong Tambag sangat berterimakasih kepada Komite sekolah yang telah mendukung kegiatan Madrasah ini, sehingga kami dengan komite orang tua wali serta masyarakat sekitar sangat mendukung kegiatan ini, kalau hanya mengandalkan Dana BOS yang kami terima tentu tidak memungkinkan untuk membangun musallah dikarekan anggaran sangatla terbatas hanya untuk Operasional sehari-hari dan pembayaran gaji guru Honorer, dan tidak menutup kemungkinan saya juga mohon bantuan kepada teman-teman para kerabat yang mau ikut berpartisipasi untuk pembangunan musallah ini. Karena sekolah kami ini swasta bukan Madrasah Negeri jadi kalau swasta ini kita masyarakatlah yang lebih memikirkan tantang kemajuan madrasah ini (Wawancara, 27 Mei 2020)”

Ibu Rita Destriana seorang guru honorer sudah 6 tahun menjadi Guru Tetap yayasan mengatakan “bahwa untuk honor yang diterimanya berasal dari dana BOS jika dananya terlambat disalurkan oleh Kemenag maka dia hrs menunggu dulu karena honor

yang dia terima bersumber dari BOS, maka saya berharap dana BOS bias disalurkan tepat waktu” ((Wawancara, 28 Mei 2020). Keterlambatan penyaluran dana bos ini juga di akui oleh kementerian Agama Kabupaten Lebong selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kemenag Kabupaten Lebong Bapak Agustinus Agus Budi Santoso, S.Ag mengatakan:

“Keterlambatan tersebut bukanlah paktor disengaja, tetapi memang ada persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi oleh Madrasah penerima Bantuan Operasional Sekolah, salah satu contoh madrasah diwajibkan mengisi data Evaluasi Monitoring Information system(EMIS) yang berbasis web, dikarenakan data siswa kita akan cocokkan dengan data manual, karena Pembayaran alokasi BOS berdasarkan Jumlah siswa/tahun) (Wawancara, 28 Mei 2020).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong Bapak Mansyahri, S.Ag, MH.I melalui Kasi Pendidikan Islam memaparkan bahwa dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah swasta yaitu sepenuhnya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah di untuk tahun berikutnya kita anggarankan pada tahun Anggaran Berjalan berdasarkan jumlah siswa pada tahun berjalan:

“Untuk usulan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Swasta Khususnya kita usulkan pada Tahun Anggaran Berjalan berdasarkan jumlah siswa pada tahun berjalan, namun tetapkan saja terdapat kendala mengenai jumlah Anggaran yang di terima karena Tahun anggaran dengan tahun

Pelajaran itu mengalami perbedaan, jadi jumlah siswa pada tahun Pelajaran tentu mengalami perbedaan jumlah siswa, sedangkan anggaran sudah kita siapkan berdasar jumlah siswa tahun lalu, namun demikian kita tetap mengusulkan perubahan anggaran ke pusat jika terdapat penambahan jumlah siswa, kalau anggaran tidak ada penambahan maka kita tetap alokasikan sesuai jumlah siswa pada tahun sebelumnya (Wawancara, 28 Mei 2020).”

Kesimpulan

Evaluasi yang dilakukan baik dari penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh pihak sekolah baik menyangkut kompetensi pengelola maupun kemandirian penggunaan dana BOS di MIS 01 Lebong Tambang merupakan salah satu media yang sangat membantu pihak sekolah itu sendiri, berkaitan dengan evaluasi penyaluran data untuk meningkatkan sumber daya tenaga pendidik, ada batasan-batasan penggunaannya seperti honor guru Tidak tetap hanya 30% dari Pagu Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedangkan kebutuhan Guru melebihi dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah ditetapkan berdasarkan Jumlah siswa. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan Ruang belajar Siswa tidak bisa digunakan untuk pembangunan RKB baru apalagi sarana ibadah seperti Musalla tidak bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ini sangatlah menyulitkan bagi pihak sekolah dikarenakan untuk pembangunan Ruang Kegiatan Belajar harus terpisah

anggarannya dari dana Bantuan Operasional sekolah (BOS).

Rekomendasi penelitian ini terkait dengan evaluasi penggunaan dana BOS di MIS 01 Lebong Tambang dan agar program tersebut dapat berjalan secara efektif dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar hendaknya pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Pemerintah dilakukan secara tepat waktu yaitu dilakukan pada awal Tahun Ajaran. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan operasional sekolah tidak mengalami hambatan sehingga kegiatan belajar mengajar akan dapat berjalan efektif.

Daftar Pustaka

- Amin, M. (2017). Implementasi Manajemen Strategis Kepala Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Serang. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 41–57.
- Dewi, A. S. P. M., & Rati, N. W. (2017). Penerapan Pendekatan Keterampilan Proses Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 1(2), 83–90.
- Gironés Guillem, P., Burguete, D., Machado, R., Domínguez Santamaría, J. M., & Lillo-Crespo, M. (2018). *Qualitative Research Process Applied to Organ Donation*.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Hamirul, H., & Apriana, D. (2019). Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Memperbaiki Proses Pembelajaran. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 55–66. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v4i1.2475>
- Hidayat, Y. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris terhadap Manajemen Pembelajaran dalam Mewujudkan Kinerja Guru. *Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 279–290.
- Hikmah, M. (2018). Developing Student Character: A Case Study of KTSP Islamic Education Subject. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(2), 177–201. <https://doi.org/10.24014/jiik.v1i2.4686>
- Ismail, F. (2018). Implementasi Total Quality Management (TQM) di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/jii.v10i2.591>
- Januwarso, A. (2017). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 1–9.
- Kasmini, N. W. A., Wirama, D. G., & Wirakusuma, M. G. (2017). Pengaruh pendidikan, kompetensi, kompensasi, motivasi, dan komitmen organisasi pada kinerja bendahara sekolah menengah di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 109–136.
- Kasno, K., Suib, M., & Wahyudi, W. (2013). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Sekolah Dasar Negeri [Journal:eArticle, Tanjungpura University]. In *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Untan* (Vol. 2, Issue 4, p. 215399). <https://www.neliti.com/publications/215399/pengelolaan-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos-di-sekolah-dasar-negeri>
- Krisbiyanto, A. (2019). Efektifitas Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Mutu Pendidikan MTsN 2 Mojokerto. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 52–69.
- Laugi, S. (2019). Memahami Organisasi untuk Keunggulan Bersaing (Kajian Manajemen Strategi di Sekolah). *Shautut Tarbiyah*, 25(1), 159–180.
- Lazwardi, D. (2017). Implementasi evaluasi program pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 142–156.
- Maghfuri, A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 14–26.
- Maryadi, M. (2014). Analisis Swot Sebagai Strategi Pengembangan IKIP PGRI Semarang1. *Media Penelitian Pendidikan*, 8(1).

- <https://doi.org/10.26877/mpp.v8i1.juni.694>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Murtiningsih, M. (2017). Pengaruh Motivasi Belajar, Sarana Belajar, Dan Percaya Diri Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Penerima BSM (Bantuan Siswa Miskin) SMP Negeri di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 5(2), 178–191. <https://doi.org/10.26740/jepk.v5n2.p178-191>
- Nasution, A. N., Kom, M. S., Kom, M., & Sari, Z. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berbasis WEB di SMPN 2 Satui Kalimantan Selatan. *Jurnal Repositor*, 2(1), 99–106.
- Rahayu, A., & Setianingsih, E. L. (2017). Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 226–239.
- Regina, B. (2015). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 61–66.
- Rohim, N. (2015). Mewujudkan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Program Wajib Belajar. *Fikrah*, 6(2).
- Rohimin, R. (2020). Reposisi Pendidikan Keluarga Bagi Anak Generasi Alfa. *Nuansa*, 12(2).
- Roulston, K. (2014). Analysing interviews. *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*, 297–312.
- Salam, R. (2016). Penerapan Fungsi Administrasi Perkantoran Modern berbasis Daya Saing Organisasi dalam menyongsong MEA 2015. *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1), 186–190.
- Saldaña, J. (2015). *The coding manual for qualitative researchers*. Sage.
- Setiawati, S. (2019). Evaluasi Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Menilai Efektifitas Dana Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Auladi Depok. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 4(2), 60–79.
- Setyaningrum, S. (2014). *Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unitcost) Dengan Model Activity Based Costing (ABC) Untuk Menentukan Standar Biaya Di Smk Negeri 3 Kota Tangerang Selatan*.
- Sihombing, D. (2017). Analisis Implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 7 Medan. *Educandum*, 10(2), 79–83.
- Sucika, P., & Suprpta, I. N. (2018). Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. *Locus*, 9(1).
- Sudarsana, I. K. (2016). Pemikiran tokoh pendidikan dalam buku lifelong learning: Policies, practices, and programs (Perspektif Peningkatan

- Mutu Pendidikan di Indonesia).
Jurnal Penjaminan Mutu, 2(2), 44–53.
- Sulistian, L., Barlian, B., & Mursidin, M. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Langara Kabupaten Konawe Kepulauan. *Jurnal Wahana Kajian Pendidikan IPS*, 1(2), 151–160.
- Warsah, I. (2020). Islamic Psychological Analysis Regarding To Rahmah Based Education Portrait At IAIN Curup. *Psikis : Jurnal Psikologi Islami*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.19109/psikis.v6i1.3941>
- Warsino, W. (2019). Evaluasi Program Pembinaan Kesamptaan Jasmani dan Kesamptaan Mental Di Setukpa Lemdiklat Polri. *Indonesian Education, Management and Sports Anthology*.